

**TESIS**

**PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN TANGKAP  
DENGAN PENDEKATAN KAPASITAS ADAPTIF  
INSTITUSIONAL DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**SYAMSU RIZAL**

**P022171101**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN & PENGEMBANGAN WILAYAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN TANGKAP DENGAN  
PENDEKATAN KAPASITAS ADAPTIF INSTITUSIONAL DI  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi  
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SYAMSU RIZAL**

**P022171101**

**Kepada**

**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS****PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN TANGKAP DENGAN  
PENDEKATAN KAPASITAS ADAPTIF INSTITUSIONAL DI  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR****Disusun dan diajukan oleh****SYAMSU RIZAL****P022171101**

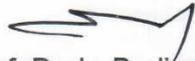
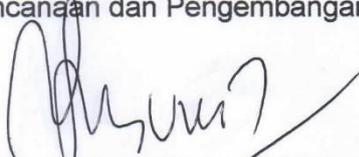
Telah di pertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah  
Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 21 Oktober 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

**Menyetujui,**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA  
Nip. 19620124 1987021002  
Dr. Muh. Banda Selamat, S.Pi, MT  
Nip. 19710326 2000031001Ketua Program Studi.  
Perencanaan dan Pengembangan WilayahDekan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin  
Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng  
Nip. 19620727 1989031003  
Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc  
Nip. 19670308 1990031001

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSU RIZAL

Nomor Mahasiswa : P022171101

Program Studi : PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 21 Oktober 2021

Yang Menyatakan



SYAMSU RIZAL

## PRAKATA

Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan pimpinan-Nya, maka penulis dapat merampungkan penyusunan tesis ini dengan judul “**Pengembangan Sektor Perikanan Tangkap dengan Pendekatan Kapasitas Adaptif Institusional di Kabupaten Kepulauan Selayar**” sekaligus merupakan salah satu kewajiban mahasiswa dalam memperoleh gelar Magister di Jurusan Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (PPW) Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Ditengah-tengah kesyukuran itu terselip rasa bangga dimana usaha untuk menyelesaikan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Namun dibalik itu Penulis juga menyadari, sebagai manusia biasa penulisan tesis ini dari segi isi dan penyajian belum dapat dikatakan sempurna. Namun demikian, inilah yang mampu penulis persembahkan saat ini sebagai sumbangan pada Almamater. Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA**, sebagai pembimbing utama, dan **Dr. Muh. Banda Selamat, S.Pi, MT**, sebagai pembimbing anggota yang telah memberikan arahan kepada penulis demi merampungkan tesis ini.
2. **Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng**, **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, dan **Dr. Muhammad Yunus, MA** sebagai penguji yang telah memberikan masukan terhadap penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

3. Staf Pegawai Bagian Akademik Sekolah Pascasarjana dan Prodi Perencanaan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi akademik tugas akhir.
4. Staf Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan akses penuh kepada penulis untuk memperoleh data dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
5. Staf Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan bantuan untuk memperoleh data dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
6. Mahasiswa Program Pascasarjana Jurusan Perencanaan dan Pengembangan Wilayah angkatan 2017 yang telah memberikan bantuan berupa *sharing* berkas administrasi, format penulisan, diskusi materi, dll.
7. Serta pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam merampungkan tesis ini.

Semoga setiap dukungan yang ditujukan terhadap penulis selama proses perumusan tesis ini dapat diberi balasan yang setimpal dari Allah SWT. Sebagai penutup, semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Makassar, November 2021

Syamsu Rizal

## ABSTRAK

**SYAMSU RIZAL.** Pengembangan Sektor Perikanan Tangkap dengan Pendekatan Kapasitas Adaptif Institusional di Kabupaten Kepulauan Selayar (dibimbing oleh Budimawan dan Muh. Banda Selamat).

Dalam menghadapi masalah peralihan kewenangan pemerintah daerah serta ketersediaan sumberdaya perikanan tangkap yang semakin terbatas membutuhkan kapasitas adaptif institusional terkait dalam rangka pengembangan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kondisi daya saing sektor perikanan tangkap, menilai kapasitas adaptif institusional pemerintah daerah dalam pengembangan sektor perikanan tangkap, serta merumuskan strategi pengembangan sektor perikanan tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif dengan analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share* (SS) untuk mengetahui daya saing sektor perikanan tangkap, analisis kapasitas adaptif institusional untuk mengetahui bagaimana kemampuan institusi terkait dalam hal ini Dinas Perikanan dalam menghadapi masalah peralihan kewenangan pemerintah daerah dan ketersediaan sumberdaya perikanan tangkap yang semakin terbatas serta analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan sektor perikanan tangkap dengan berdasarkan kapasitas adaptif institusional.

Hasil dari penelitian ini adalah sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan sektor basis, namun secara pertumbuhan kurang maju dan lambat serta secara daya saing masih kalah bersaing dengan produk dari luar. Kapasitas adaptif institusional pemerintah daerah menunjukkan bahwa cenderung negatif dengan nilai rata-rata kapasitas adaptif sebesar -0,02. Selanjutnya nilai koordinat matiks *grand strategy* menghasilkan 0,91 dan 0,74, sehingga strategi pengembangan yang direkomendasikan adalah dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Adapun alternatif strategi yang direkomendasikan adalah menggunakan keunggulan komparatif yang dimiliki sektor perikanan tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memanfaatkan dukungan legitimasi perencanaan dari tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memanfaatkan dukungan infrastruktur yang dikelola oleh tingkat regional Sulawesi Selatan dan pusat serta memanfaatkan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan secara baik dengan menggunakan kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif sebagai tujuan jangka panjang.

Kata Kunci : Kapasitas Adaptif Institusional, Daya Saing, Pengembangan Perikanan Tangkap, SWOT

## ABSTRACT

**SYAMSU RIZAL.** Development of the Capture Fisheries Sector with an Institutional Adaptive Capacity Approach in the Selayar Islands Regency (supervised by Budimawan and Muh. Banda Selamat).

In dealing with the problem of shifting the authority of local governments and the availability of increasingly limited capture fisheries resources, it requires relevant institutional adaptive capacity in the context of developing the capture fisheries sector in the Selayar Islands Regency. The purpose of this study is to assess the condition of the competitiveness of the capture fisheries sector, to assess the institutional adaptive capacity of local governments in the development of the capture fisheries sector and to formulate a strategy for developing the capture fisheries sector in the Selayar Islands Regency.

The method used in this research is descriptive quantitative analysis with Location Quotient (LQ) and Shift Share (SS) to determine the competitiveness of the capture fisheries sector, institutional adaptive capacity analysis to find out how the related institutions capabilities in this case the Fisheries Department face the shifting authority problem of local government and the availability of increasingly limited capture fisheries resources as well as SWOT analysis to formulate capture fisheries sector development strategies based on institutional adaptive capacity.

The results of this study are the capture fisheries sector in Selayar Islands Regency is a basic sector, but its growth is less advanced and slow and competitively still unable to compete with products from outside. The institutional adaptive capacity of local government shows that it tends to be negative with an average value of -0.02 adaptive capacity. Furthermore, the coordinates of the grand strategy matrix produce 0.91 and 0.74, so the recommended development strategy is to use the strengths they have to take advantage of existing opportunities. The recommended alternative strategy is to use the comparative advantage of the capture fisheries sector of the Selayar Islands Regency by utilizing the legitimacy of planning support from the South Sulawesi Province level, using policy support from the Selayar Islands Regency local government by utilizing infrastructure support managed by the South Sulawesi regional and central levels. and take advantage of strategies and policies that have been well formulated by using the policy of developing new productive economic growth centers as a long-term goal.

**Keywords** : Institutional Adaptive Capacity, Competitiveness, Capture Fisheries Development, SWOT

## DAFTAR ISI

<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
<b>BAB. II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Sumberdaya Perikanan.....	6
B. Potensi dan Pemanfaatan Sektor Perikanan.....	7
C. Daya Saing Sektor Perikanan .....	10
D. Kapasitas Adaptif Institusional.....	12
E. Strategi Pengembangan Sektor Perikanan.....	17
F. Penelitian yang Relevan.....	21
G. Kerangka Konseptual.....	26
H. Defenisi Operasional.....	27
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Rancangan Penelitian .....	30
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	30
C. Jenis dan Sumber Data.....	31

D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
1. Pengumpulan Data Produksi Sektor .....	32
2. Pengumpulan Data Dokumen Institusi .....	33
E. Analisis Data .....	34
1. Analisis Daya Saing Sektor Perikanan .....	34
2. Analisis Kapasitas Adaptif Institusional .....	38
3. Analisis SWOT.....	43
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
B. Daya Saing Sektor Perikanan .....	48
C. Kapasitas Adaptif Institusi Pemerintah .....	55
D. Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Tangkap.....	61
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR GAMBAR

<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
<b>Gambar 1.</b> Kerangka Konseptual Penelitian.....	27
<b>Gambar 2.</b> Peta Lokasi Penelitian .....	31
<b>Gambar 3.</b> Dimensi dan Kriteria Lingkaran Kapasitas Adaptif (Gupta et al., 2010) .....	42
<b>Gambar 4.</b> Matriks <i>grand strategy</i> (Rangkuti, 1997) .....	45
<b>Gambar 5.</b> Grafik nilai produksi perikanan tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2019.....	50
<b>Gambar 6.</b> Peta Daerah Penangkapan Ikan Pelagis dan Demersal di Kabupaten Kepulauan Selayar.....	52
<b>Gambar 7.</b> Lingkaran Kapasitas Adaptif Institusional Dinas Perikanan Kabupaten kepulauan Selayar (Data primer yang diolah, 2021) .....	61
<b>Gambar 8.</b> Matriks <i>grand strategy</i> pengembangan sektor perikanan tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar .....	69
<b>Gambar 9.</b> Anggaran Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar (Juta Rupiah) (BI Sulsel, 2020). .....	84

## DAFTAR TABEL

<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
<b>Tabel 1.</b> Produksi Berdasarkan Sub Sektor Perikanan dan Kabupaten/Kotamadya, Tahun 2013 .....	8
<b>Tabel 2.</b> Jenis dan Sumber Data .....	32
<b>Tabel 3.</b> Dimensi dan Kriteria Kapasitas Adaptif Institusional di Kabupaten Kepulauan Selayar .....	38
<b>Tabel 4.</b> Tingkatan yang digunakan dalam menilai dimensi dan kriteria kapasitas adaptif .....	41
<b>Tabel 5.</b> Matriks SWOT strategi pengembangan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar .....	45
<b>Tabel 6.</b> Produk Domestik Regional Bruto Kepulauan Selayar Sesuai Harga Berlaku Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016–2020 .....	48
<b>Tabel 7.</b> Hasil Perhitungan Nilai Location Quotient (LQ) sub sektor perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	53
<b>Tabel 8.</b> Hasil Analisis Shift-Share sub sektor perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	53
<b>Tabel 9.</b> Dimensi Variation .....	57
<b>Tabel 10.</b> Dimensi Learning Capacity .....	57
<b>Tabel 11.</b> Dimensi Sumber Daya.....	58
<b>Tabel 12.</b> Dimensi Perubahan Mandiri.....	59
<b>Tabel 13.</b> Dimensi Kepemimpinan.....	59
<b>Tabel 14.</b> Dimensi Pemerintahan yang Adil.....	60
<b>Tabel 15.</b> Pengelompokan isu dan kebijakan berdasarkan kategori SWOT .....	62
<b>Tabel 16.</b> Penilaian faktor strategi internal (IFAS) .....	65
<b>Tabel 17.</b> Penilaian faktor strategi eksternal (EFAS) .....	67

<b>Tabel 18.</b> Matriks SWOT strategi pengembangan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar .....	70
<b>Tabel 19.</b> Alternatif Strategi yang Direkomendasikan yang difokuskan pada posisi kekuatan-peluang (S-O). .....	75

**DAFTAR LAMPIRAN**

<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
<b>Lampiran 1.</b> Data Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar.....	94
<b>Lampiran 2.</b> Hasil Perhitungan <i>Location Quotient</i> (LQ) dan <i>Shift Share</i> (SS) .....	95
<b>Lampiran 3.</b> Penentuan Bobot Faktor IFAS dan EFAS .....	97

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perikanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah kegiatan terkait pemanfaatan dan penanganan sumberdaya ikan yang meliputi proses sebelum produksi, saat produksi, pengolahan dan pemasaran yang dilakukan dalam lingkup kesatuan bisnis perikanan. Sumberdaya perikanan adalah sesuatu yang bernilai ekonomi yang dapat diperoleh melalui cara penangkapan dan budidaya.

Pengelolaan sumberdaya perikanan telah diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal tersebut menjabarkan bahwa pemerintah provinsi memiliki otoritas untuk mengelola sumberdaya alam laut yang berada dalam lingkup wilayahnya. Salah satu bentuk otoritas pemerintah provinsi dalam mengelola sumberdaya alam laut adalah pengaturan tata ruang. Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk kedalam wilayah yang memiliki sektor perikanan dengan kemungkinan untuk dikembangkan (RTRW Provinsi Sulsel, 2019). Selanjutnya dipertegas bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar dijadikan sebagai wilayah dengan sektor unggulan perikanan (RPJMD Provinsi Sulsel, 2019).

Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2014), salah satu permasalahan utama perikanan tangkap di Indonesia secara umum adalah padat tangkap yang juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut terjadi karena armada penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi kapal dengan ukuran dibawah 5 GT (*gross ton*). Menurut data DKP Provinsi Sulsel (2020), kapal ikan dibawah 5 GT (*gross ton*) sebesar 89% dari total keseluruhan jenis kapal ikan berdasarkan ukuran di Kabupaten Kepulauan Selayar. Armada penangkapan ikan yang berukuran dibawah 5 GT umumnya memiliki keterbatasan jelajah yakni di perairan dibawah 12 mil. Sehingga kebanyakan armada penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar terpusat di perairan tertentu sehingga pemanfaatan potensi perikanan tangkap menjadi tidak tersebar merata.

Lebih lanjut berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2018-2021, masalah yang dihadapi dalam pembangunan sektor perikanan adalah karena sektor tersebut terkait dengan sektor lain serta memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap hubungan khususnya dengan aspek lingkungan. Permasalahan lain yang mengakibatkan rendahnya produktivitas perikanan tangkap dan daya saing produk perikanan tangkap adalah penyatuan sistem produksi di hulu dan hilir serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai masih terbatas. Masalah lain yang menyebabkan lemahnya daya saing produk perikanan adalah kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan yang belum mumpuni. Banyak dari masyarakat yang menggantungkan

hidup pada usaha perikanan, tetapi tidak didukung dengan pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan teknologi. Terkait peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditargetkan sebesar 35.179,12 ton, namun pada realisasinya hanya sebesar 18.729,2 ton (LAKIP, 2020).

Menghadapi tantangan pengembangan sektor perikanan khususnya perikanan tangkap, penting adanya upaya penyesuaian sistem yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penyesuaian sistem yang dimaksud adalah institusi terkait harus mampu menghadapi kerumitan masalah yang dihadapi dalam pengembangan sektor perikanan tangkap (Termeer *et al.*, 2011). Kemampuan adaptasi yang dihasilkan institusi dapat terwujud melalui proses pengambilan keputusan, perencanaan, negosiasi dan koordinasi (Svendsen, *et al.*, 2005 dalam Sagala *et al.*, 2017). Menurut Marshall *et al.* (2010), kapasitas adaptif adalah kemampuan menghadapi tantangan dengan metode pembelajaran, mengelola risiko dan dampak, mengembangkan pengetahuan dan merumuskan pendekatan yang efektif. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya perikanan secara tidak langsung dapat menjadi tantangan dalam pengembangan sektor perikanan tangkap. Pemerintah provinsi memiliki otoritas untuk mengelola sumberdaya alam laut yang berada dalam lingkup wilayahnya sehingga kewenangan kabupaten/kota hanya untuk urusan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat

Pelelangan Ikan (TPI) dan penerbitan izin perikanan budidaya. Hal ini tentu saja membatasi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sumberdaya perikanan tangkap yang sebagian besar bersumber di perairan laut. Selain faktor kewenangan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, faktor ketersediaan sumberdaya perikanan tangkap yang semakin terbatas akibat fenomena *overfishing* juga dapat menjadi penghambat dikemudian hari dalam rangka pengembangan sektor perikanan tangkap.

Merujuk pada hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian pengembangan sektor perikanan tangkap dengan pendekatan kapasitas adaptif institusional dalam menghadapi masalah peralihan kewenangan pemerintah daerah serta ketersediaan sumberdaya perikanan tangkap yang semakin terbatas.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dihasilkan berdasarkan deskripsi latar belakang diatas adalah :

1. Bagaimana kondisi daya saing sektor perikanan tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Bagaimana kapasitas adaptif institusional pemerintah daerah dalam pengembangan sektor perikanan tangkap?
3. Bagaimana strategi pengembangan sektor perikanan tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Menilai kondisi daya saing sektor perikanan tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Menilai kapasitas adaptif institusional pemerintah daerah dalam pengembangan sektor perikanan tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Merumuskan strategi pengembangan sektor perikanan tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah menjadi *input* terhadap pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam merumuskan kebijakan pembangunan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian yaitu kajian daya saing sektor perikanan tangkap, kapasitas adaptif institusional pemerintah daerah, serta strategi pengembangan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sumberdaya Perikanan**

Sumberdaya perikanan yang kaya dan beragam memiliki potensi nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa Indonesia. FAO (2014) merilis data produksi ikan pada tahun 2012, Indonesia menempati urutan ke-2 dalam produksi perikanan tangkap dan ke-4 dalam produksi budidaya di seluruh dunia. Namun, hasil tangkapan ini masih jauh dari potensi yang bisa dimanfaatkan, menurut Direktur Utama Perusahaan Perikanan Indonesia (PERINDO), Risyanto Suanda, potensi tangkapan Indonesia sebesar 65 juta ton pada tiap tahun, sedangkan produksi ikan hanya 33,4 juta ton. termasuk 24 juta ton hasil perikanan budidaya dan 9,4 juta ton hasil tangkapan (Ika, 2018). Fakta ini menunjukkan bahwa potensi perikanan Indonesia sangat penting sebagai salah satu sumber modal utama pembangunan bila dikelola dengan baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Untuk memperoleh potensi perikanan didapatkan dengan dua cara yakni metode penangkapan dan metode budidaya. Sumberdaya perikanan laut meliputi sumberdaya ikan demersal yang hidupnya dekat dengan dasar perairan, Sumberdaya ikan pelagis yang hidupnya di kolom perairan, sumberdaya pelagis besar seperti cakalang, tuna, tenggiri dan lain-lain, serta sumberdaya udang dan biota selain ikan seperti kuda laut. Sedangkan sumberdaya budidaya meliputi budidaya laut (ikan, moluska dan rumput

laut). budidaya air payau, budidaya air tawar termasuk air umum (danau, waduk, sungai dan rawa, kolam air tawar dan sawah) (Putra, 2011)

## **B. Potensi dan Pemanfaatan Sektor Perikanan**

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 5,8 juta km<sup>2</sup> luas wilayah laut dengan berbagai sumberdaya kelautan dan perikanan yang dapat dikelola. Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas (2014), Potensi lestari atau *maximum sustainable yield* (MSY) sumber daya ikan di laut Indonesia adalah 6,5 juta ton per tahun, dan tangkapan yang bisa diberikan izin adalah 5,2 juta ton per tahun (80% dari MSY). Sedangkan, potensi perikanan tangkap yang sangat besar di perairan umum (termasuk danau, waduk, sungai, rawa dan genangan air lainnya), luasnya sekitar 54 juta hektar yang diperkirakan mencapai 900.000 ton per tahun. Sedangkan untuk budidaya perikanan, potensinya meliputi: a) 8,3 juta hektar kawasan budidaya laut (dimana budidaya ikan 20%, budidaya kerang 10%, budidaya rumput laut 60%, dan lain-lain 10%), b) budidaya air payau 1,3 juta hektar atau tambak, c) 2,2 juta hektar budidaya air tawar (termasuk 526.400 hektar tambak, 158.200 hektar perairan umum (danau, waduk, sungai dan rawa), dan sawah Minapadi, meliputi seluas 155 Juta hektar.

Pemanfaatan sektor perikanan di Sulawesi Selatan tahun 2013 mencapai 2.884.006,7 Ton yang terdiri dari subsektor perikanan budidaya sebesar 259.769,1 Ton dan subsektor perikanan laut sebesar 277.849,0 Ton (Tabel 1).

Pada tahun 2013 Kabupaten Kepulauan Selayar memanfaatkan sektor perikanan dengan memproduksi sebesar 40.122,8 Ton atau sekitar 1,7% dari total pemanfaatan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan subsektor perikanan budidaya sebesar 11.549,9 Ton dan subsektor perikanan laut sebesar 28.572,9 Ton (Tabel 1).

**Tabel 1.** Produksi Berdasarkan Sub Sektor Perikanan dan Kabupaten/Kotamadya, Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Jumlah (Ton)	Sub Sektor Perikanan		
		Budidaya	Laut	Umum
Luwu	561,246.0	553,764.3	7,076.0	405.7
Luwu Utara	200,121.6	195,327.9	4,751.0	42.7
Wajo	167,884.1	150,593.5	10,853.9	6,436.7
Bone	219,851.8	194,664.5	25,073.4	113.9
Sinjai	48,080.5	20,954.5	27,126.0	-
Bulukumba	167,599.1	114,043.8	53,555.3	-
Selayar	40,122.8	11,549.9	28,572.9	-
Bantaeng	109,434.1	104,628.7	4,805.4	-
Jeneponto	153,093.6	136,411.1	16,682.5	-
Takalar	599,636.8	586,009.7	13,627.1	-
Makassar	13,350.4	971.5	12,378.9	-
Maros	23,841.7	8,884.3	14,510.6	446.8
Pangkep	149,035.2	140,268.9	8,766.3	-
Barru	21,844.8	4,664.4	17,180.4	-
Parepare	3,438.6	96.7	3,341.9	-
Pinrang	42,710.2	30,627.3	11,806.1	276.8
Gowa	1,104.9	600.0	-	504.9
Luwu Timur	272,089.6	263,239.4	8,606.6	243.6
Palopo	80,517.6	71,337.9	9,179.7	-
Soppeng	3,176.4	142.6	-	3,033.8
Sidrap	3,412.7	622.1	-	2,790.6

Enrekang	576.0	564.1	-	11.9
Toraja	694.0	679.0	-	15.0
Toraja Utara	1,144.2	1,123.0	-	21.2
<b>Jumlah (Ton)</b>	<b>2,884,006.7</b>	<b>2,591,769.1</b>	<b>277,894.0</b>	<b>14,343.6</b>

*Sumber : BPS Sulsel, 2013*

Mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Bahuluang, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar adalah nelayan dengan persentase sebesar 90,91%. Kegiatan penangkapan ikan telah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga berbagai perahu dan alat tangkap sebagai kelengkapan dari aktifitas tersebut sudah menjadi keharusan. Jenis tangkapan nelayan sangat bervariasi, jumlah dan jenis ikan yang diperoleh juga bergantung dengan musim. Jenis ikan yang paling banyak ditangkap yaitu katamba, sunu, kerapu, kakap dan teripang. Hasil tangkapan nelayan juga bervariasi dengan jumlah tangkapan rata-rata 5-20 kg (Fachry, 2015).

Permasalahan umum yang dihadapi oleh nelayan saat ini adalah tangkapan hasil laut yang semakin berkurang dan sulitnya mendapatkan pekerjaan baru selain sebagai nelayan. Hasil tangkapan di laut yang tidak selalu optimal khususnya di musim paceklik membuat masyarakat Pulau Bahuluang memiliki alternatif mata pencaharian untuk meningkatkan pendapatannya yaitu memanfaatkan potensi budidaya rumput laut. Namun hal ini juga tidak lepas dari berbagai permasalahan yang membuat produksi menurun atau gagal panen. Sehingga masyarakat kembali mengantungkan hidupnya pada tangkapan hasil laut (Fachry, 2015).

### C. Daya Saing Sektor Perikanan

Perencanaan pembangunan dalam sektor kelautan dan perikanan didasari oleh konsep pembangunan berkelanjutan yang perlu didukung oleh pengembangan industri berbasis sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk mencapai daya saing yang tinggi. Ada 3 (tiga) pilar utama terkait pembangunan sektor perikanan ke depannya, yaitu membangun keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam sektor perikanan sesuai keunggulan komparatif (*comparative advantage*), membangun sistem ekonomi berdasarkan mekanisme pasar yang adil, dan membangun ekonomi daerah yang kuat dan efektif dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah. Adapun tiga tahap pembangunan daya saing, yaitu tahap pembangunan yang didorong oleh kelimpahan sumber daya alam (*resources driven*), tahap pembangunan berbasis investasi (*investment driven*) dan tahap pembangunan berbasis inovasi (*innovation driven*) (Akoit dan Nalle, 2018). Selain itu, ada tiga komponen penting dalam sistem perikanan berkelanjutan, yaitu sistem alam (*natural system*) termasuk ikan, ekosistem dan lingkungan biofisik, sistem manusia (*human system*) termasuk nelayan, pengolah, pengguna, komunitas nelayan, sosial, ekonomi dan budaya, dan sistem pengelolaan perikanan termasuk kebijakan dan perencanaan perikanan, pengelolaan dan pengembangan perikanan serta penelitian perikanan (Nurhayati *et al.*, 2018).

Untuk mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan diperlukan pembatasan *input* dan *output*. Beberapa pembatasan yang dapat diterapkan adalah (KPPU, 2010):

1. *Input control*, yaitu pengaturan besarnya usaha yang dilakukan dalam kegiatan penangkapan ikan, meliputi:
  - a) *Limitting entry*, yaitu membatasi jumlah nelayan yang bisa menangkap ikan.
  - b) *Limitting capacity per vessel*, yaitu membatasi jenis dan ukuran kapal dan alat penangkap yang digunakan.
  - c) *Limitting time and allocation*, yaitu membatasi waktu dan lokasi penangkapan ikan.
2. *Output control*, yaitu pengaturan hasil tangkapan setiap nelayan, meliputi:
  - a) *Total allowable catch*, yaitu mengatur jumlah maksimum ikan yang dapat ditangkap oleh semua nelayan. tahun.
  - b) *Individual quota*, yaitu mengatur kuota tangkapan kepada setiap individu nelayan.
  - c) *Community quota*, yaitu mengatur kelompok kuota tangkapan.

Daya saing suatu daerah berkaitan dengan kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan perekonomiannya dengan memanfaatkan potensi yang ada dan memproduksi serta memasarkan produk atau jasa yang dibutuhkan secara berkelanjutan oleh pasar. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan dengan kondisi geografis sebagai daerah kepulauan yang memiliki potensi besar dalam

menyediakan sumberdaya perikanan dan kelautan. Ketersediaan serta potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar pada sumberdaya perikanan dan kelautan memberikan predikat kepantasan kepada daerah ini untuk mampu menjadi salah satu sentra kelautan dan perikanan yang terdapat di Indonesia.

Peran sektor perikanan dapat diketahui dengan menghitung *Location Quotient* (LQ). *Location Quotient* merupakan perbandingan antara pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor perikanan pada tingkat wilayah terhadap total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan sektor perikanan pada tingkat kabupaten terhadap pendapatan kabupaten. Analisis LQ dilakukan dengan menghitung nilai LQ sektor perikanan terhadap pendapatan perikanan, keseluruhan sektor dan tenaga kerja (Gumilang, 2019).

Potensi ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dengan menggunakan analisis *Shift Share* dengan menentukan kinerja tenaga kerja atau produktivitas perekonomian wilayah tersebut dan mengkomparasikannya dengan wilayah yang lebih besar. Asumsi yang dibangun oleh analisis ini bahwa perubahan pendapatan, produksi atau tenaga kerja di suatu wilayah terbagi kedalam tiga komponen, yaitu komponen pertumbuhan regional, proporsional, dan berdasarkan pangsa wilayah (Gumilang, 2019).

#### **D. Kapasitas Adaptif Institusional**

Kapasitas adaptif adalah kemampuan suatu sistem untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi dampak negatif guna

meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi (IPCC, 2000; IPCC, 2007). Menurut Marshall *et al.* (2010), kapasitas adaptif adalah kemampuan menghadapi tantangan dengan metode pembelajaran, mengelola risiko dan dampak, mengembangkan pengetahuan dan merumuskan pendekatan yang efektif.

Faktor penentu kemampuan beradaptasi adalah teknologi, ekonomi, infrastruktur, informasi dan keterampilan, lembaga masyarakat dan akses ke sumberdaya (IPCC, 2007). Dolan dan Walker (2004) berpendapat bahwa kemampuan pelaku adaptasi merupakan salah satu penentu kapasitas adaptif. Handmer dan Dovers (1996) juga menambahkan bahwa faktor penentu adaptasi adalah ketersediaan sumberdaya dan kemudahan akses untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur. Kerusakan infrastruktur dapat menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi, karena perbaikan kerusakan infrastruktur membutuhkan biaya (Satterthwaite *et al.*, 2007; Purifyningtyas dan Wijaya, 2016).

Tata kelola pemerintahan secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat (Sedarmayanti, 2003:3). Sedangkan Menurut World Bank (1992:79), tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana

investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sedarmayanti (2003:4) menegaskan bahwa dari segi fungsional, apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi diperlukan tiga kaki untuk menilainya, yaitu :

1. *Political governance*, adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
2. *Administrative governance*, adalah sistem implementasi proses kebijakan.
3. *Economic governance*, yang meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making process*) yang memfasilitasi terhadap *equity* (kesetaraan), *poverty* (kesejahteraan) dan *quality of life* (kualitas hidup).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan dalam adaptasi perubahan iklim maka yang menjadi tujuan adalah kapasitas adaptif dan atau ketahanan terhadap perubahan iklim (*climate change resilience*). Konsep ketahanan (*resilience*) secara umum adalah upaya membangun kapasitas sistem untuk bertahan dari goncangan, bangkit kembali, dan berupaya untuk berubah termasuk terhadap perubahan yang tidak diantisipasi (VanBreda, 2001:52). Sedangkan ketahanan terhadap perubahan iklim (*climate change resilience*) adalah kapasitas dari individu, komunitas, atau

institusi untuk secara dinamis dan efektif memberikan respons atau tanggapan terhadap kondisi perubahan dari dampak iklim dan terus melakukan fungsinya dalam tingkat yang dapat diterima dengan membuat, mengubah, dan mengimplementasikan beragam pilihan-pilihan (tindakan) adaptif. Secara sederhana ketahanan adalah kemampuan untuk bertahan dan bangkit kembali dari dampak perubahan iklim (*Rockefeller Foundation White Paper*, 2009:16). Selain individu, komunitas, dan institusi yang harus memiliki ketahanan sebagaimana dijelaskan *Rockefeller Foundation White Paper*, VanBreda (2001:iii) mengkategorisasikan ketahanan dalam enam jenis, yaitu *individual resilience*, *family resilience*, *community resilience*, *resilience-based policy*, dan *resilience theory in social work*. Malone *et al.* (2005:45) mengusulkan adanya kesamaan antara ketahanan dan kapasitas adaptif karena pada kasus-kasus tertentu faktor penentu kapasitas adaptif disamakan dengan indikator ketahanan. Persamaan itu memungkinkan sebagai pendekatan untuk pengukuran kapasitas adaptif dalam mengukur ketahanan pada sebuah daerah atau komunitas. Kapasitas adaptif merujuk pada kemampuan sumber daya sedangkan adaptasi dan ketahanan merujuk pada hasilnya. Menurut Lebel *et al.* (2006:29) peran pemerintah sangat mempengaruhi adanya ketahanan (*resilience*) terutama ketahanan komunitas (*community resilience*) dan ketahanan kebijakan (*resilience-based policy*).

Ketahanan (*resilience*) pada dasarnya juga dipandang sebuah metafora, dengan akar dalam ilmu fisika dan matematika, istilah awalnya

digunakan untuk menggambarkan kapasitas bahan atau sistem untuk kembali ke ekuilibrium setelah terjadi guncangan (Norris *et al.*, 2008:16). Suatu masyarakat yang pernah terkena bencana akan cenderung melakukan mekanisme resiliensi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau kembali pada kondisi semula sebelum bencana terjadi. Resiliensi terhadap bencana dan upaya pemulihan yang dilakukan oleh suatu masyarakat, komunitas, atau daerah dipelajari dari berbagai perspektif pembelajaran termasuk sosiologi, implementasi kebijakan, pengambilan keputusan, rekayasa, geografi dan perencanaan kota yang pernah ada. Oleh karena itu, resiliensi merupakan suatu proses yang mengarah pada adaptasi, bukan suatu hasil tetapi mengarah pada kembali ke kondisi stabil (Norris *et al.*, 2008:17). Dapat disimpulkan bahwa resiliensi sebagai mekanisme yang dilakukan oleh individu, keluarga, komunitas, sistem, dan kebijakan dengan melihat kapasitas sistem dan potensi terkena bencana dan berusaha untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya dengan pembelajaran yang dimiliki. Malone *et al.* (2009:46) mengidentifikasi delapan faktor penentu kapasitas adaptif sebagai berikut :

1. Pilihan teknologi yang tersedia untuk melakukan adaptasi;
2. Ketersediaan sarana prasarana dan distribusinya pada seluruh lapisan masyarakat;
3. Keberadaan lembaga yang memiliki otoritas pengambilan keputusan, dan adanya kriteria tentang pilihan keputusan yang akan digunakan;

4. Kemampuan pengambil keputusan untuk mengelola informasi, termasuk proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang kredibel, serta kredibilitas dari pengambil keputusan itu sendiri;
5. Kepercayaan publik terhadap kemampuan lembaga yang memiliki otoritas pengambilan keputusan;
6. Kualitas sumber daya manusia;
7. Keberadaan modal sosial, termasuk mekanisme pelibatannya dalam sebuah lembaga;
8. Akses sistem untuk menjalankan proses penyebaran pengetahuan tentang risiko dengan membangun kolaborasi.

#### **E. Strategi Pengembangan Sektor Perikanan**

Masalah utama bagi keberlanjutan perikanan tangkap adalah rendahnya daya saing produk perikanan, kurangnya pengembangan pasar untuk hasil perikanan dan perlindungan kualitas ikan, keterbatasan akses modal untuk pengembangan usaha perikanan tangkap, kualitas nelayan masih relatif rendah, maraknya *Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing*, penangkapan ikan yang berlebihan, lemahnya kapasitas kelembagaan penegak hukum dan pengawasan, sistem pendataan hasil tangkapan yang parsial dan tidak dapat diandalkan (Kementerian PPN/Bappenas, 2014).

Dalam rangka mengatasi isu utama yang dimaksud tersebut perlunya kajian skala daerah terkait menentukan strategi pengembangan sektor

perikanan. Dalam menentukan strategi pengembangan sektor perikanan penting untuk mengetahui terlebih dahulu pihak-pihak yang berperan (*Stakeholder*). Sehingga perlu dilakukan analisis dalam mengidentifikasi *stakeholder* tersebut.

Menurut Blackman (2003), *stakeholder* merupakan orang yang mempengaruhi dampak suatu kegiatan atau juga orang yang terpengaruh oleh dampak suatu kegiatan. *Stakeholder* dapat berupa individu, kelompok, komunitas atau lembaga. *Stakeholder* meliputi: a) Kelompok pengguna, orang yang menggunakan sumberdaya atau layanan di suatu area. b) Kelompok kepentingan yaitu orang yang memiliki kepentingan, pendapat yang dapat mempengaruhi penggunaan sumberdaya atau layanan. c) Penerima manfaat, contohnya proyek. d) Pembuat keputusan. e) Yang sering mendapat pengecualian dari proses pengambilan keputusan.

*Stakeholder* dapat dibagi menjadi dua jenis utama: 1) *Stakeholder* Primer, yang mendapat dampak positif maupun negatif dari suatu kegiatan. Istilah ini menggambarkan orang-orang yang kesejahteraannya mungkin bergantung pada sumber daya atau layanan atau area. Biasanya mereka tinggal di daerah atau sangat dekat dengan sumber daya yang bersangkutan. Mereka seringkali memiliki sedikit pilihan ketika dihadapkan pada perubahan, sehingga mereka mengalami kesulitan beradaptasi. *Stakeholder* primer biasanya rentan. Mereka adalah alasan mengapa suatu kegiatan biasa dilakukan. 2) *Stakeholder* Sekunder, mencakup semua

orang dan lembaga lain yang berkepentingan dengan sumber daya atau bidang yang sedang dipertimbangkan.

Analisis *stakeholder* adalah alat yang berguna untuk mengidentifikasi *stakeholder* dan menjelaskan sifat, peran, dan kepentingan mereka. Idealnya, analisis *stakeholder* harus dilakukan dengan perwakilan dari sebanyak mungkin kelompok *stakeholder*. Mungkin tidak selalu praktis untuk melakukannya jika *stakeholder* tersebar luas. Namun, jika ada bahaya bahwa *stakeholder* yang penting mungkin tidak terlibat, lebih banyak waktu dan sumberdaya harus diinvestasikan dalam melakukan analisis *stakeholder* untuk memastikan mereka dilibatkan.

Menurut Reed *et al.* (2009), salah satu metode populer menggunakan minat dan pengaruh untuk mengklasifikasikan *stakeholder* menjadi *Key Player*, *Context setters*, *Subject* dan *Crowd*. Ini kemudian dapat membantu untuk menentukan bagaimana *stakeholder* dapat dilibatkan. *Key player* misalnya adalah para *stakeholder* yang harus dibina secara aktif, karena memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap suatu fenomena tertentu. *Context setters* sangat berpengaruh, tetapi memiliki sedikit kepentingan. Karena itu, mereka mungkin menjadi risiko yang signifikan, dan harus dipantau serta dikelola. Subjek memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruh yang rendah dan meskipun secara definisi mereka mendukung, mereka kurang kapasitas untuk memberi dampak, meskipun mereka mungkin berpengaruh dengan membentuk aliansi bersama *stakeholder* lainnya. Mereka sering kali merupakan *stakeholder* marjinal

yang ingin diberdayakan oleh proyek pembangunan. *Crowd* adalah *stakeholder* yang memiliki sedikit kepentingan serta pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan ada sedikit kebutuhan untuk mempertimbangkannya secara mendetail atau terlibat dengan mereka. Kepentingan dan pengaruh biasanya berubah seiring waktu dan dampak dari perubahan tersebut dapat dipertimbangkan. Misalnya, *stakeholder* dapat membentuk aliansi untuk mempromosikan atau mengalahkan hasil tertentu dan analisis *stakeholder* dapat digunakan untuk mengidentifikasi dimana aliansi tersebut kemungkinan besar akan muncul.

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berhubungan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan. Oleh karena itu, perencanaan strategis (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi saat ini. Ini disebut analisis situasi dan model analisis yang paling umum adalah analisis SWOT (Ferrell & Hartline, 2011).

Menurut Kotler (2000), analisis SWOT adalah penilaian yang komprehensif dari kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif akan mengurangi kelemahan dan ancaman. Ketika diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini menghasilkan dampak besar pada rancangan strategi yang dibuat.

Menurut Ferrell & Hartline (2011), analisis SWOT digunakan untuk mengumpulkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya menjadi masalah internal (kekuatan dan kelemahan) dan masalah eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT akan menjelaskan apakah informasi tersebut menunjukkan sesuatu yang akan membantu mencapai tujuan atau memberikan hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Analisis dilakukan terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi selama pembangunan dipetakan dalam matriks EFAS (*external factor analysis*) dan IFAS (*internal factor analysis*) untuk membentuk inisiatif strategis berdasarkan empat perspektif kondisi yang dihadapi. Pengembangan strategi SO dilakukan dengan mencocokkan kekuatan yang dimiliki dengan peluang yang ada, sedangkan penggunaan kekuatan untuk menghadapi ancaman mengarah pada strategi ST. Kelemahan harus diminimalisir dengan memanfaatkan peluang yang ada melalui strategi WO. Dan kombinasi kelemahan dan ancaman yang ada harus diantisipasi dengan strategi WT (Rangkuti, 1997).

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Nurhayati *et al.* (2018), dalam kajiannya menjelaskan bahwa untuk menjamin manfaat bagi pelaku ekonomi dan melestarikan sumberdaya yang ada, penggunaan sumberdaya perairan umum harus diatur oleh lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi adaptif pengelolaan sumberdaya berbasis kelembagaan lokal dalam menjawab

tantangan pengelolaan sumberdaya perairan umum yang efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *penelitian participatory action research*, kemudian data primer dan sekunder diperoleh dari *Focus Group Discussion* (FGD) dan survei selanjutnya dideskripsikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibentuk organisasi lokal di Waduk Cirata yaitu Masyarakat Peduli Cirata (MPC) dengan partisipasi beberapa pemangku kepentingan yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC), pembudidaya ikan KJA dan masyarakat pengguna perairan umum. Pengelolaan sumber daya perairan berbasis kelembagaan di Waduk Cirata tersebut dapat dijadikan sebuah contoh yang dapat diterapkan di daerah lain untuk kasus serupa. Elemen kunci dari strategi adaptasi yang mendukung efektivitas kelembagaan Waduk Cirata adalah pemanfaatan dan pengendalian yang tepat didasari atas kesepahaman pemangku kepentingan tentang fungsi potensial waduk dan dampaknya terhadap lingkungan. Implementasi strategi ini terdiri dari: 1) mengizinkan keberlanjutan budidaya di keramba jaring apung (KJA), tetapi tetap melakukan kontrol dan evaluasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dengan melibatkan kelompok MPC, 2) mendorong pengembangan wisata pancing (*recreational fishing*), namun tetap melakukan tindakan pengendalian tangkapan ikan agar tidak merusak kelestarian ikan di daerah tersebut (ikan endemik), 3) pemanfaatan eceng gondok yang dikombinasikan dengan upaya pembersihan jalur transportasi air.

Harmunanto *et al.* (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pada tahun 2015, hasil produksi perikanan tangkap Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah 53.612 ton, hasil produksil tersebut menjadikan Kabupaten Bulukumba menempati posisi pertama untuk produksi perikanan tangkap serta terus mengalami peningkatan produksi di setiap tahunnya. Oleh karena itu, sektor perikanan harus mampu memberikan kontribusi penting bagi sektor ekonomi daerah dan provinsi. Namun pemanfaatan hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bulukumba saat ini belum optimal karena sarana dan prasarana penangkapan yang belum memadai serta kurangnya pengetahuan nelayan terhadap hasil tangkapannya sehingga hasil tersebut tidak memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat setempat khususnya nelayan di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi perikanan tangkap di Kabupaten Bulukumba. Potensi tangkapan perikanan ditentukan dengan menganalisis *Location Quotient* (LQ). Selanjutnya dilakukan perhitungan konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Bulukumba untuk mengetahui peluang pengembangan hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bulukumba memiliki potensi besar dalam sektor perikanan tangkap yang terlihat dari peningkatan komoditas yang berbeda setiap tahunnya. Namun pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut memerlukan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana perikanan yang memadai, serta sistem pengelolaan perikanan yang baik agar potensinya dapat dimanfaatkan

secara optimal. Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang optimal dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Kabupaten Bulukumba dan masyarakat khususnya para nelayan.

Gumilang (2019), melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kompetitif Industri Perikanan di Kabupaten Cirebon. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana sektor perikanan dapat menjadi sektor basis serta mengkaji daya saing sektor perikanan dengan analisis *shift share* sebagai *tools* di Kabupaten Cirebon. Analisis deskriptif kuantitatif merupakan metode yang diadopsi pada penelitian tersebut. Analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share* (SS) adalah jenis analisis kuantitatif yang digunakan. Data sekunder yang digunakan pada penelitian tersebut adalah data PDRB Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017 yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rentang waktu tahun 2013-2017, sektor utama yang berperan dalam kontribusi perekonomian Kabupaten Cirebon adalah sektor perikanan itu sendiri yang menghasilkan nilai LQ sebesar 3,027. Sedangkan untuk Daya saing wilayah (PPW) sektor perikanan di Kabupaten Cirebon terbilang masih rendah karena hanya menghasilkan nilai komponen PPW sebesar -3029. Tetapi terdapat nilai komponen yang positif yaitu komponen Pertumbuhan Regional (PR) dengan nilai 145.316 dan Pertumbuhan Proporsional (PP) dengan nilai 12,174. Hal ini menandakan adanya potensi pertumbuhan untuk sektor perikanan di Kabupaten Cirebon.

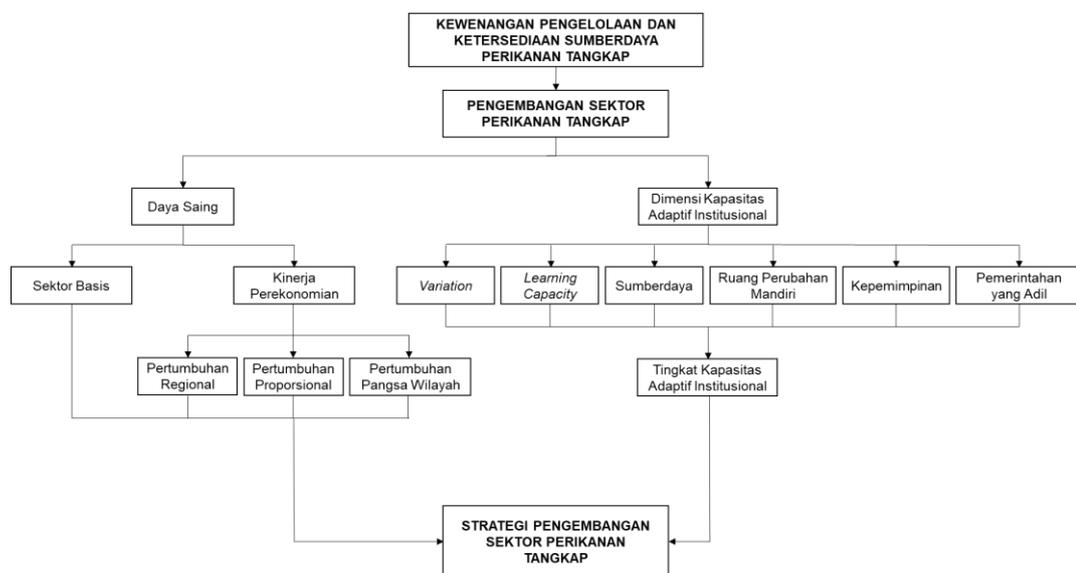
Susantri *et al.* (2019), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Kota Palopo menjadi salah satu kota Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo memiliki kriteria baru sebagai “Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berpotensi atau mendukung ekonomi kelautan nasional” pada tahun 2017. Ekonomi kelautan adalah seluruh aktivitas ekonomi yang bergantung pada produk-produk hasil kelautan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengembangan sektor perikanan dalam mendukung peran Kota Palopo sebagai PKW. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan kuantitatif dengan metode LQ untuk menganalisis industri perikanan sebagai sektor basis ekonomi kelautan kota Palopo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Palopo memiliki sumberdaya ikan yaitu perikanan tangkap dan budidaya. Hasil perikanan Kota Palopo juga berasal dari berbagai daerah, yang menjelaskan keterkaitan antara Kota Palopo dengan wilayah atau kabupaten/lokasi PKW lainnya untuk kegiatan distribusi komoditas khususnya beberapa hasil perikanan. Pengembangan sektor perikanan baik perikanan maupun budidaya memerlukan sarana penunjang dan lahan dengan potensi pengembangan hasil perairan yang melimpah, peningkatan nilai produksi dan dampak positif terhadap lingkungan. lingkungan. perekonomian kota Palopo. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian untuk mengetahui perkembangan sektor perikanan dalam mendukung peran Kota Palopo sebagai PKW.

## **G. Kerangka Konseptual**

Pengembangan sektor perikanan khususnya perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan sesuatu keharusan mengingat arahan pengembangan regional yang menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai wilayah dengan sektor unggulan perikanan. Perikanan tangkap merupakan sektor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menjadi suatu kebutuhan untuk dapat mengetahui sejauh mana peran sektor perikanan tangkap dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta daya saing sektor perikanan tangkap. Masalah yang dihadapi kemudian adalah adanya tantangan berupa peralihan kewenangan pemerintah daerah serta ketersediaan sumberdaya perikanan tangkap yang semakin terbatas. Dalam menghadapi tantangan tersebut, institusi terkait dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar harus menjadi garda terdepan dalam melakukan penyesuaian terhadap sistem maupun perilaku yang dianut pada lingkungan masyarakat. Instansi terkait perlu menjadi institusi yang adaptif yaitu institusi yang mampu merencanakan dan menerapkan kebijakan berdasarkan tantangan yang dihadapi. Untuk mengetahui sejauh mana kapasitas adaptif institusional dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu dilakukan kajian berdasarkan Indikator kapasitas adaptif yang meliputi dimensi variasi (*variation*), *learning capacity*, sumberdaya, ruang perubahan mandiri, kepemimpinan dan pemerintahan yang adil. Dengan mengetahui kapasitas

adaptif institusional dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya akan mampu merumuskan suatu formulasi perencanaan yang menggunakan pendekatan kapasitas adaptif institusional pemerintah dalam rangka menghadapi tantangan yang ada.

Berangkat dari uraian diatas, sehingga dirumuskan alur pikir penelitian dengan tujuan agar memberi penjelasan tentang masalah yang sekaligus menjadi kerangka konsep pada penelitian ini (Gambar 1):



**Gambar 1.** Kerangka Konseptual Penelitian

## H. Defenisi Operasional

Beberapa konsep yang digunakan pada penelitian ini mempunyai definisi tersendiri, diantaranya:

1. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor di bidang ekonomi yang memiliki peran sebagai sumber penghasil bahan makanan dan sumber bahan baku industri.

2. Pengembangan sektor perikanan merupakan salah satu upaya untuk menambah penghasilan nelayan dan daya saing komoditas perikanan dengan rancangan agribisnis.
3. Agribisnis adalah rancangan dari suatu sistem usaha yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan dan berpengaruh yaitu penyediaan sarana produksi perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta kelembagaan sebagai penunjang perikanan.
4. Kapasitas adaptif institusional adalah kemampuan dari suatu sistem dalam hal ini institusi yang dinilai menggunakan indikator variation, learning capacity, sumber daya, ruang perubahan mandiri, kepemimpinan dan pemerintahan yang adil dalam rangka mengatasi tekanan atau perubahan.
5. Strategi merupakan tindakan yang diambil dalam menanggapi peluang dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal dapat berpengaruh dalam upaya untuk mengembangkan di sektor pertanian.
6. Analisis SWOT merupakan analisis yang dikombinasikan antara faktor eksternal (peluang dan ancaman) dengan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang dialami dalam pengembangan sektor perikanan.
7. Lingkungan internal merupakan faktor yang dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam mengembangkan sektor perikanan. Lingkungan internal yang dianalisis meliputi sumber daya manusia (petani), kondisi keuangan (permodalan), pemasaran, produksi dan kelembagaan (kelompok tani) dan lain sebagainya.

8. Lingkungan eksternal merupakan faktor yang mampu mengidentifikasi peluang dan ancaman bagi pengembangan sektor perikanan. Lingkungan eksternal yang dianalisis meliputi pendapatan masyarakat nelayan, peluang usaha dan penciptaan lapangan kerja, pemasok sarana produksi, dukungan pemerintah, kualitas sumber daya manusia dan faktor alam penangkapan ikan.
9. Kekuatan merupakan faktor internal dalam pengembangan sektor perikanan dan keunggulan bagi pengembangan potensi perikanan.
10. Kelemahan merupakan faktor internal dalam pengembangan sektor perikanan dan keterbatasan bagi pengembangan potensi perikanan.
11. Peluang merupakan faktor eksternal dalam pengembangan sektor perikanan dan bermanfaat bagi pengembangan potensi perikanan
12. Ancaman adalah faktor eksternal dalam pengembangan sektor perikanan yang mengganggu pengembangan potensi perikanan.
13. Matriks SWOT merupakan matriks yang berfungsi untuk merumuskan berbagai alternatif strategi pengembangan sektor perikanan melalui strategi SO "*Strength Opportunities*", WO "*Weakness Opportunities*", ST "*Strength Threats*" dan WT "*Weakness Threats*".